



BPK Penuhi Janji Soal Audit Hambalang Tahap II

Presiden Disenggol Anggota DPR Diduga Terlibat



Setelah beberapa kali tertunda, akhirnya Kepala BPK, Hadi Purmomo menyerahkan laporan audit tahap II proyek Hambalang kepada Pimpinan KPK Abraham Samad, Jumat (23/8). *W*

2010-2011, Ratusan Miliar Duit Negara Mengucur Tanpa Pengawasan

JAKARTA-RK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memenuhi janji. Laporan pemeriksaan keuangan alias audit proyek pembangunan sport center Hambalang tahap II, meng-

Bisa Sama, Bertambah, dan Berkurang

■ Halaman 10

Ternyata, kerugian negara yang ditemukan dalam audit investigatif tahap II pelaksanaan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional.

■ Halaman 10



Presidendari halaman 1

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di salah satu halaman pemeriksaan keuangan tersebut tertulis bahwa Presiden terancam disomasi terkait alokasi anggaran pendidikan tahun 2009 yang kurang dari 20 persen. Di halaman lain, 15 anggota DPR RI diduga terlibat mengucurkan duit Negara tanpa melalui proses yang benar.

Dalam halaman 42 dokumen audit yang didapat Rakyat Merdeka Online, tertulis bahwa ancaman somasi terhadap Presiden berawal dari pertemuan MRM dengan MAT tentang rencana proyek Sentul.

MRM adalah Mindo Rosalina Manulang, selaku anak buah M Nazaruddin di Permai Group. Sementara, MAT adalah M Arief Taufiqurrahman, Marketing DK-1 PT AK, alias orang dalam PT Adhi Karya. Pertemuan yang terjadi sekitar 2009 itu terwujud melalui undangan berinisial LHD. "Pada saat itu, MAT mewakili Kepala DK I (TBMN) menghadiri undangan kepada divisi BUMN di sebuah kantor yang terletak di jalan Casablanca, di belakang Hotel Haris, Jakarta Selatan. Pada pertemuan tersebut, PT PP yang diwakili LHD dan PT DGI yang diwakili MRM menyatakan berminat mendapat proyek Hambalang," demikian bunyi petikan itu. Nah, dalam pertemuan itu sebenarnya membahas terkait kekurangan alokasi anggaran pendidikan tahun 2009 yang kurang dari 20%. "Hal ini akan membahayakan posisi Presiden yang kemungkinan disomasi," bunyi petikan kesimpulan hal 42 tersebut. Meski demikian, tak dijelaskan maksud dari kata 'Presiden'. Untuk memenuhi 20% anggaran pendidikan tersebut, maka diambil dari dana yang bersumber dari rekening 'BA 99'. Dana tersebut kemudian

dialihkan jadi belanja modal di bidang pendidikan. Dari situlah Rosa akan berperan dalam proyek-proyek (termasuk di dalamnya proyek Sentul) kepada beberapa BUMN Karya yang kemudian akan bekerja sama dengan PT Anak Negeri dan atau PT Anugerah. "Pada waktu itu proyek sentul tersebut hendak diberikan kepada PT PP seperti keinginan LHD. Selain itu, MRM juga menunjukan daftar pekerjaan yang rencananya akan diberikan ke BUMN-BUMN Karya tertentu."

Lima belas wakil rakyat pun diduga ikut bertanggung jawab dalam proses pengucuran dana proyek yang sudah memakan korban beberapa tersangka korupsi itu. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahap dua setebal 77 halaman menyebutkan bahwa belasan anggota DPR tersebut meloloskan dana ratusan miliar rupiah, tanpa proses yang semestinya. Disebutkan pula dalam dokumen hasil audit yang ditandatangani penanggung jawab J Widodo H Mumpuni tersebut, sembilan orang anggota Badan Anggaran di antaranya telah memberikan persetujuan alokasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan APBN-P Kemenpora Tahun Anggaran 2010. Anggaran itu diloloskan, meski anggaran optimalisasi Rp 600 miliar belum dibahas dan ditetapkan dalam Raker Komisi X DPR bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga. "Hal itu melanggar ketentuan yang diatur dalam UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 96," tulis hasil audit BPK pada halaman 7. Masih berdasarkan dokumen hasil audit BPK, disebutkan, selama tahun 2010 dan 2011, anggaran ratusan miliar rupiah milik negara mengucur tanpa adanya pengawasan.

Terkait hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga memuluskan anggaran proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional, Hambalang.

Ketua KPK, Abraham Samad, menegaskan, apapun dari hasil audit dalam kasus hambalang akan didalami dan ditindaklanjuti. "Jadi tidak usah khawatir," tegasnya, Jumat (23/8), di Kantor KPK.

Dijelaskan Samad, jika memang dalam laporan BPK itu ada hal yang cukup memberi ruang bagi KPK untuk mendalami, maka pihaknya tetap akan memeroses. "Akan kita dalami," ujar bekas pengacara itu.

Ketua BPK, Hadi Purnomo, enggan menanggapi permasalahan ini karena hasil audit itu bersifat rahasia. "Jadi kami tidak berhak mengungkapkan maka laporannya kami serahkan ke KPK dan DPR tapi statusnya rahasia," kata Hadi, di kesempatan yang sama.

Inilah Rincian Dugaan Penyimpangan 15 Dewan Itu

Namun, dalam dokumen investigatif, BPK merinci peran 15 legislator itu dalam perencanaan dan pembahasan anggaran. Dalam dokumen itu, tertulis peran MNS, RCA, HA, dan AHN, selaku pimpinan Komisi X DPR.

Mereka menandatangani persetujuan alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan kegiatan pada APBN Perubahan Kemenpora tahun anggaran 2010. Meskipun, tambahan anggaran optimalisasi sebesar Rp 600 miliar belum dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi X dan Kemenpora. Rp 150 miliar selanjutnya dialokasikan untuk P3SON Hambalang.

Tak hanya itu, BPK juga

menyebut APPS, WK, KM, JA, dan MI, selaku Kelompok Kerja Anggaran Komisi X DPR, menandatangani persetujuan alokasi anggaran menurut program dan kegiatan pada APBN Perubahan Kemenpora tahun anggaran 2010.

Pada tahun anggaran berikutnya, MNS dan RCA, selaku pimpinan Komisi X DPR menandatangani persetujuan alokasi anggaran menurut program dan kegiatan pada APBN Kemenpora tahun anggaran 2011. Sekali lagi, meskipun tambahan anggaran optimalisasi sebesar Rp 920 miliar belum dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi X dan Kemenpora. Di antara anggaran itu, Rp 500 miliar dialokasikan untuk P3SON Hambalang.

Kemudian, APPS, WK, KM, JA, UA, AZ, EHP, MY, MHD, dan HLS selaku Pokja Anggaran dari Komisi X DPR menandatangani persetujuan alokasi anggaran menurut program dan kegiatan pada APBN Kemenpora tahun anggaran 2011.

Lantas, siapa saja wakil rakyat yang terhormat itu? Dalam audit BPK, memang hanya tertulis inisial nama saja. Namun, dari penelusuran wartawan unit DPR, 15 orang—yang diduga melakukan penyimpangan dana Hambalang selama dua periode—itu adalah MNS (Mahyuddin NS), RCA (Rully Chairul Azwar), HA (Herry Ahmadi), AHN (Abdul Hakam Naja), APPS (Angelina Patricia Pingkan Sondakh), WK (Wayan Koster), KM (Kahar Muzakir), MI (Mardiana Idraswari), JA (Juhaidi Alie), UA (Utut Adianto), MI EHP (Eko Hendro Purnomo), MY (Mahmud Yunus), MHD (Muh. Hanif Dakhiri), HLS (Herry Lontung Siregar).

Re-editing : Mohamad iqbal



Bisa Samadari halaman 1

Hambalang oleh Badan Pemeriksa Keuangan, belum sepenuhnya selesai.

Ketua BPK, Hadi Purnomo mengatakan, saat ini pihaknya dan Komisi Pemberantasan Korupsi berkoordinasi untuk melakukan finalisasi laporan.

"Kita tunggu, mudah-mudahan tidak lama lagi. Sedang diproses finalisasi antara BPK dan KPK," katanya, di Kantor KPK, Jumat (23/8).

Angka kerugian negara Rp 471,707 miliar dalam audit tahap II Hambalang yang diserahkan BPK kepada KPK, bukamlah nilai akhir. Angka ini baru sekedar indikasi.

Menurut Hadi, hasil akhir perhitungan kerugian keuangan negara angka itu bisa sama, bertambah maupun berkurang.

"Bisa sama, bisa bertambah dan bisa berkurang," tegasnya.

Dijelaskan Hadi, kalau pemeriksaan investigatif itu masih ada indikasi kerugian negara. Tapi untuk perhitungan kerugian negara, indikasi hilang, diganti menjadi kerugian negara.

Ini yang akan kami finalisasi dengan KPK dan BPK," tegasnya.

Lantas apakah kerugian negara belum final, KPK dapat menahani tersangka Hambalang?

Ketua KPK, Abraham Samad, menegaskan, tidak ada hubungannya antara penahanan dan perhitungan kerugian negara.

"Cuma memang KPK harus menghitung jadwal. Kalau kita perkirakan perhitungan kerugian negara masih lama," katanya di kesempatan sama.

Dua tersangka Hambalang pun belum dikurung. Yakni, bekas Menteri Pemuda Olahraga Andi Alifian Mallarangeng dan bekas pejabat PT Adhi Karya, Teuku Bagus M. Noor.

"Kita tidak bisa menahan terlalu cepat karena kita terkait dengan batas penahanan," tegas Abraham.

Tetapi, ia menambahkan, dengan adanya pertemuan KPK-BPK dan karena ini sudah masuk dalam tahap finalisasi, maka bisa memperkirakan kapan selesainya melakukan perhitungan.

Abraham juga menambahkan, kemungkinan minggu depan sudah melakukan pemanggilan tersangka kasus Hambalang. "Jadi berdoa saja. Minggu depan insya Allah, kita akan melakukan pemanggilan," katanya.

Dia memastikan tidak ada satu pun tersangka di KPK yang tak dijebloskan ke tahanan. Menurutnya, berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), seseorang yang ditetaskan sebagai tersangka, maka penyelesaian akhirnya harus dilakukan penahanan.

Re-editing : Mohamad iQbal.